

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL BAGI
MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19
DI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Namira Okita Zahra Siregar
NPP 29.0147

*Asdaf Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: namiraokitazahra@gmail.com

ABSTRACT

Background (GAP): The Covid-19 pandemic is an epidemic that is worrying the whole world. Covid-19 not only has an impact on the health sector, but also has an impact on all sectors of life, including the economic sector. The community needs the government's role to assist recovery by providing assistance in the form of social assistance. **Purpose:** This study aims to determine the role of the Tebing Tinggi City Social Service in distributing social assistance to the people of Tebing Tinggi City who are affected by Covid-19, the factors that hinder the role and efforts to overcome them. This study uses the role theory proposed by Soejono Soekanto (2013). **Method:** The research method used in this study uses descriptive qualitative methods by providing data collection methods, namely facts and explanations of data revealed in the field through observation, interviews, and documentation. The sampling method used purposive sampling and snowball sampling. **Result:** The results of this study indicate that the Cliff Tinggi City Social Service in distributing social assistance in the midst of the Covid-19 pandemic in Tebing Tinggi City is good but not optimal. Data collection for the community in accordance with predetermined criteria and characteristics is the most important thing in achieving distribution in accordance with the predetermined target. **Conclusion:** This is due to several inhibiting factors, including incomplete KPM personal information and data. In addition, the existence of data that is not updated is also a difficulty in distribution. Furthermore, the lack of public awareness also affects the distribution and the existence of internal obstacles, namely food ingredients from social assistance which cannot last long. These obstacles can be overcome through the efforts made such as improving the system, conducting outreach to the community, and coordinating or cooperating with social pillars.

Keywords: Covid-19 pandemic, role, social assistance, distribution

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Pandemi Covid-19 adalah wabah yang sedang mengkhawatirkan seluruh dunia. Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak pada seluruh sektor kehidupan, termasuk sektor ekonomi. Masyarakat membutuhkan peran pemerintah untuk membantu pemulihan dengan memberikan bantuan berupa bantuan sosial. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam

menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi yang terdampak Covid-19, faktor yang menghambat peranan serta upaya dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto (2013). **Metode:** Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menyediakan metode pengumpulan data, yaitu fakta dan penjelasan data yang terungkap di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling dan snowball sampling*. **Hasil:** Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam melakukan penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19 di Kota Tebing Tinggi sudah baik namun belum optimal. Pendataan bagi masyarakat sesuai dengan kriteria dan karakteristik yang telah ditentukan merupakan hal yang paling penting dalam mencapai penyaluran yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. **Kesimpulan:** Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain informasi dan data pribadi KPM tidak lengkap. Selain itu juga adanya data yang tidak diperbarui juga menjadi kesulitan penyaluran. Selanjutnya, kurangnya kesadaran masyarakat juga berpengaruh terhadap penyaluran serta adanya hambatan internal yakni bahan makanan dari bantuan sosial yang tidak dapat tahan lama. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui upaya-upaya yang dilakukan seperti melakukan perbaikan sistem, Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi atau menjalin kerjasama dengan pilar-pilar sosial

Kata Kunci: Pandemi Covid-19, peran, bantuan sosial, penyaluran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia tengah disibukkan dengan wabah virus yang telah menjadi pandemi bernama COVID-19 (*Corona Virus Disease - 2019*). Di Indonesia sendiri hal tersebut telah menjadi bencana yang mengancam kesejahteraan masyarakat yang kemudian diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Menanggapi hal tersebut pemerintah pusat tidak menerapkan pelaksanaan karantina atau blockade wilayah, namun penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara yang juga terkena dampak dari mewabahnya virus COVID-19 dan menjadi yang pertama melakukan tindakan pencegahan terhadap virus COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara. Kota Tebing Tinggi termasuk daerah hinterland yang merupakan penyanggah bagi daerah di sekitarnya dan menjadikan Kota Tebing Tinggi sebagai kota tempat daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan. Angka kemiskinan di Kota Tebing Tinggi terus meningkat akibat dari adanya virus COVID-19 hingga 12.137 jiwa menurut data dari pusat, pandemic Covid-19 telah mempengaruhi lebih dari 23.000 orang secara finansial. Jika pandemi ini tidak berhenti, perekonomian kita akan merosot.

Dinas sosial dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan perlindungan sosial kepada masyarakat bersama dengan *stakeholder* terkait dengan menjalankan program-program bantuan sosial dari pemerintah. Melalui program bantuan sosial pemerintah ini, akan mendukung masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi dalam menghadapi pandemi yang mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat. Peran Dinas Sosial sebagai aparat pemerintah dalam menangani masalah masyarakat saat ini sangat diharapkan dapat membantu seluruh masyarakat.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyaluran bantuan sosial akan lebih efektif jika Dinas Sosial mampu menjamin terlaksananya penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial harus lebih proaktif menyinergikan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan dengan bantuan sosial termasuk Perum Bulog terhadap seluruh jenis bantuan sosial sehingga dapat menjamin efektivitas kerja dari Dinas Sosial. Selain itu, salah satu hal yang penting terkait penyaluran bantuan sosial adalah Dinas Sosial wajib *mengupdate* dan memperbaiki data secara terus-menerus agar data keluarga penerima bantuan sosial semakin sinkron dan valid dengan data yang telah ada di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial sehingga akan tepat dan sesuai.

Data yang telah didapatkan tersebut akan dilaporkan kepada pihak Dinas Sosial lalu akan diteruskan kepada pihak Kementerian Sosial untuk dilakukan pengolahan data melalui Pusdatin Kementerian Sosial. Namun, pemutakhiran data penerima bantuan sosial ternyata membutuhkan persetujuan *update* DTKS dari Kementerian Sosial memerlukan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan gangguan dari pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Selain itu, adanya kendala Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat dikarenakan kurangnya pendataan yang lengkap seperti calon penerimanya sudah meninggal atau sudah pindah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai dasar acuan bagi terlaksananya penelitian. Penelitian Fathul Khoiriyah, dkk berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro (fathul Khoiriyah, dkk, 2020), menemukan bahwa program pemerintah berupa bantuan tersebut kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dikarenakan tidak ada pembaharuan data sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Perlu adanya program yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Erni Panca Kurniasih berjudul Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota Pontianak (Erni Panca Kurniasih, 2020), menemukan bahwa adanya subsidi dari pemerintah membantu masyarakat mengurangi pengeluaran selama pandemic COVID-19. Penelitian Ariska Suriyanti berjudul Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar (Ariska Suriyanti, 2021), menemukan bahwa Dalam mengurangi kemiskinan Dinas Sosial dapat memberi bantuan berdasarkan garis kemiskinan. Penelitian Nindya

Cahaya Rosadi berjudul Efektivitas Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Perumahan Taman Cikande, Jayanti-Tangerang (Nindya Cahya Rosadi, 2021), menemukan bahwa Pemberian bantuan sosial dapat membantu masyarakat namun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Pemberian bantuan sosial akan tepat sasaran jika diberikan sesuai kriteria. Penelitian Faghila Nur Fitria, dkk berjudul Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Dari Pemerintah Untuk Disalurkan Kepada Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 (Faghila Nur Fitria, dkk, 2021), menemukan bahwa Pemberian bantuan sosial akan efektif dan tepat sasaran jika validasi data seperti NIK dari KPM tidak berbeda pada saat penyaluran bantuan sosial yang menjadi acuan sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana konteks dari penelitian yang dilakukan yakni penyaluran bantuan sosial yang merupakan tugas dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Perbedaan kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah lokasi penelitian. Fokus penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yang erat kaitannya dengan tugasnya dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kota Tebing Tinggi dimana belum pernah dibahas sebelumnya. Pengukuran/ indikator dalam penelitian ini menggunakan pendapat dari Soejono Soekanto (2013) yang terdiri dari peran adalah norma, peran adalah suatu konsep dan peran adalah perilaku individu.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran dari Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera utara.

II. METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang bermaksud agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara terstruktur, factual dan akurat dalam menemukan kebenaran yakni dengan penelitian terhadap keadaan suatu objek yang dapat menghasilkan suatu kesimpulan secara umum tentang bagaimana Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran bantuan Sosial bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada Teknik wawancara, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi, Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kepala Bappeda, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tebing Tinggi serta Masyarakat (dalam hal ini masyarakat sebanyak 5 orang). Adapaun analisisnya menggunakan teori peran oleh Soejono Soekanto (2012:213) yang menyatakan bahwa peranan merupakan

aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 menggunakan teori dari Soejono Soekanto (2013) yang memiliki 3 dimensi yakni peran adalah norma, peran adalah suatu konsep dan peran adalah perilaku individu. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Sosial

Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan, hal ini dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan misi dari dinas yaitu untuk meningkatkan penanganan PMKS secara terpadu dan sistematis, Melalui kerjasama, meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pemerintah daerah dan meningkatkan penyelenggaraan e-Government yang baik dan bersih, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

3.1.1 Peran adalah Norma

Berdasarkan konsep peran yang telah disampaikan menurut Soekanto, peneliti berpendapat bahwa norma dalam menjalankan suatu peran adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan. Begitu juga dengan norma atau aturan yang dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi selaku instansi yang membantu tugas dari kepala daerah.

Berdasarkan konsep peranan yang disampaikan sebelumnya, dalam melaksanakan penyaluran bantuan sosial, Dinas Sosial harus tetap menjalankan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Kegiatan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi tersebut diupayakan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menyediakan tempat atau wadah mencuci tangan serta membuat jadwal penyaluran untuk meminimalisir kerumunan yang berlebihan. Adapaun salah satu contoh dalam pelaksanaan pembukaan rekening sembako PPKM yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi.

Penerima manfaat program sembako sesuai alokasi pemerintah adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di wilayah Kota Tebing Tinggi, dan Namanya masuk dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikeluarkan oleh kementerian.

3.1.2 Peran adalah suatu konsep

Peran sebagai suatu konsep merupakan suatu bentuk kegiatan yakni apa yang bisa dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Konsep tersebut dapat berupa strategi maupun kebijakan yang dimana dalam Hal ini, apa strategi dan kebijakan apa dan bagaimana yang harus Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dapat lakukan dan dapat upayakan dalam penyelenggaraan penyaluran bantuan sosial.

Data yang diterima oleh Dinas Sosial didapatkan melalui pendataan oleh kelurahan yang selanjutnya diteruskan kepada Dinas Sosial. Dari Dinas Sosial, dimasukkan dan didata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data penerima bantuan sosial akan dicek kembali oleh Dinas Sosial dan apabila ditemukan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial namun belum terdaftar akan diusulkan kembali melalui sistem SIKS-NG.

Penyaluran bantuan sosial akan tepat sasaran jika penerima bantuan sosial juga sesuai dengan kriteria penerima bantuan sosial yang telah diatur. Pada tahun 2020 diketahui bahwa Kementerian Sosial menyalurkan tiga jenis bantuan sosial bagi Kota Tebing Tinggi yakni PKH, KPM Program Sembako dan BST.

3.1.3 Peran adalah Perilaku

Peran adalah perilaku bagaimana Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengendalikan dalam hal ini pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Tebing Tinggi. Selain itu, bagaimana masyarakat juga bersikap, berperilaku serta berpartisipasi sebagai objek dari bantuan sosial.

Penyaluran bantuan sosial diselenggarakan tentu dengan bantuan pihak lain. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses penyaluran sehingga dapat dilaksanakan dengan sistematis dan lebih terkoordinir. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta masing-masing camat dan lurah yang ada di Kota Tebing Tinggi merupakan pihak yang berkenaan dengan penyaluran bantuan sosial. Masing-masing kelurahan tersebut memiliki petugas verifikasi yang akan membantu dalam perbaikan data DTKS atau pengusulan masuk DTKS dimana biaya tersebut ditanggung oleh APBD Kota Tebing Tinggi.

Partisipasi dalam penyaluran bantuan sosial baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sendiri sangat dibutuhkan. Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi sebagai penyelenggara kegiatan juga harus dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyaluran bantuan sosial. Dinas Sosial harus mampu mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam kesuksesan penyelenggaraan kegiatan.

3.2 Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial

Adapun faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yakni sebagai berikut:

3.2.1 Informasi atau Data Pribadi Penerima Bantuan Tidak Lengkap

Data penerima bantuan sosial yang digunakan pada tahun 2021 ini merupakan data penerima bantuan sosial pada tahun 2020. Adanya kesalahan data pribadi penerima bantuan sosial seperti kurangnya huruf pada nama, kesalahan NIK ataupun data yang kurang akurat walaupun masyarakat tersebut telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di DTKS akan menyebabkan penolakan sehingga tidak dapat menerima bantuan sosial.

Bantuan sosial hanya akan disalurkan dengan tepat apabila data datanya tepat. Apabila data yang ada salah, maka bantuan sosial yang disalurkan akan diterima oleh pihak yang tidak seharusnya. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya menjadi penerima bantuan sosial akhirnya menimbulkan rasa diabaikan oleh pemerintah. Hal ini yang membuat pendataan menjadi hal mendasar yang sangat penting agar penyaluran bantuan sosial menjadi tepat sasaran.

3.2.2 Data Penerima Bantuan Sosial Tidak Diperbarui

Data yang dimiliki oleh Dinas Sosial yang dalam hal ini dilaporkan ke DTKS harus terus dimutakhirkan dengan tujuan agar mereka yang dianggap mampu tidak dilaporkan sebagai penerima bantuan sosial. Selain itu, masyarakat yang telah berpindah ke daerah lain atau telah meninggal dunia juga harus terdata di Dinas Sosial agar bantuan sosial dapat diberikan secara tepat. Masyarakat yang merupakan penerima bantuan sosial dan berpindah diwajibkan untuk melapor kepada kelurahan setempat agar bantuan sosial yang menjadi hak masyarakat tersebut dapat disalurkan sesuai dengan domisili nya sehingga tetap mendapatkan bantuan sosial.

Selain itu, banyak masyarakat yang tidak mengetahui apakah dirinya telah terdaftar di DTKS atau tidak sebagai KPM padahal Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi telah melakukan sosialisasi untuk memastikan terdaftarnya seseorang di DTKS dapat diketahui dengan menanyakan langsung ke Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan KTP dan KK ataupun dapat mengakses melalui email.

3.2.3 Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Berdasarkan observasi yang dilakukan secara langsung, diketahui bahwa banyak Keluarga Penerima Manfaat yang terlihat lebih mampu dari masyarakat sekitarnya yang bukan termasuk dalam Penerima Bantuan Sosial. Karakteristik yang

telah ditentukan tampak tidak berpengaruh dalam pendataan penerima bantuan sosial. Masyarakat memiliki pandangan bahwa bantuan sosial akan terus diberikan dan dengan begitu dapat membantu kehidupan sehari-hari. Hal tersebut menimbulkan pola pikir masyarakat yang hanya berharap pada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah.

3.2.4 Bahan Makanan pada Program Sembako yang Tidak Tahan Lama

E-Warong adalah tempat-tempat yang telah disepakati antara Dinas Sosial dengan Bank Penyalur sebagai titik penyaluran bantuan sosial dengan memperhatikan kemudahan akses dan akses jaringan telekomunikasinya. Melalui E-Warong, bahan makanan akan lebih murah dan terjamin sesuai dengan prinsip program sembako. Namun, hal tersebut tidaklah mudah karena orang yang tempat atau pemukimannya dipercaya sebagai tempat E-Warong harus bekerja lebih dikarenakan bahan makanan yang tidak dapat bertahan lama.

3.3 Upaya Dinas Sosial Dalam Mengatasi Faktor Penghambat

Upaya dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat peran Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di Kota Tebing Tinggi. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.3.1 Melakukan Perbaikan Sistem

Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi harus mengerahkan petugas yang berada di setiap kelurahan agar dapat lebih mengetahui permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat selama adanya penyaluran bantuan sosial. Selain itu, perbaikan sistem juga dapat berupa perbaikan dan pembaruan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan meng-*update* dan menyesuaikan data sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Perbaikan data ini perlu melibatkan kepedulian masyarakat serta peranan dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang tidak diperbarui selama beberapa tahun sehingga terjadi tumpang tindih informasi dari masyarakat seperti pindah domisili, meninggal dunia dan sebagainya tidak diketahui oleh pemerintah. Peran pemerintah daerah dalam hal ini yakni untuk lebih aktif turun ke lapangan dan memastikan jumlah masyarakatnya yang menerima bantuan sosial di setiap kelurahan.

3.3.2 Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Upaya kedua yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mampu mengetahui serta menggunakan email ataupun aplikasi yang telah disediakan untuk melihat status bahwa telah terdaftar di DTKS atau tidak. Selain itu, sosialisasi diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk lebih peduli pada diri sendiri sehingga dapat melakukan *self-reporting*.

3.3.3 Melakukan Koordinasi dengan Pilar-Pilar Sosial

Upaya selanjutnya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi faktor penghambat dinas yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dipercaya mampu mendorong pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Salah satu contoh organisasi yang ada adalah karang taruna. Karang taruna dapat menjadi wadah bagi pemuda-pemudi yang ada untuk ikut dalam kegiatan kemanusiaan sebagai wujud kebersamaan dan persatuan salah satu contoh kegiatannya adalah penyaluran bantuan sosial.

Karang taruna di setiap kelurahan juga dapat melakukan beberapa kegiatan berdasarkan fungsi dari karang taruna sendiri yakni melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dapat dilakukan kepada masyarakat terutama generasi muda disaat pandemi Covid-19 ini dengan melakukan berbagai karya yang dapat menunjang dan memulihkan perekonomian sehingga masyarakat tidak selalu mengahrapkan adanya bantuan dari pemerintah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penyaluran bantuan sosial memberikan banyak manfaat dan dampak positif bagi masyarakat dalam rangka membantu pemulihan perekonomian masyarakat. Penulis menemukan temuan penting yakni penyaluran bantuan sosial akan berjalan dengan baik apabila adanya beberapa faktor yang memengaruhi, salah satunya adalah dengan memperbaiki sistem pendataan. Sama halnya dengan temuan Fathul Khoiriyah, dkk bahwa program pemerintah berupa bantuan tersebut kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dikarenakan tidak ada pembaharuan data sehingga menjadi tidak tepat sasaran. Perlu adanya program yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya bantuan sosial ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam perekonomian sehari-hari dimana hal ini sama halnya dengan temuan Erni Panca Kurniasih yang berisikan bahwa adanya subsidi dari pemerintah membantu masyarakat mengurangi pengeluaran selama pandemic COVID-19.

Bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat harus diberikan sesuai dengan karakteristik yang telah ditetapkan. Selain itu, masyarakat yang diberikan bantuan sosial dilihat berdasarkan garis kemiskinan yang ada. Sama halnya dengan temuan Ariska Suriyanti bahwa dalam mengurangi kemiskinan Dinas Sosial dapat

memberi bantuan berdasarkan garis kemiskinan. Hal tersebut bertujuan agar bantuan sosial yang diberikan dapat diberikan tepat sasaran. Sama juga halnya dengan temuan Nindya Cahya Rosadi bahwa bantuan sosial ini diberikan untuk membantu masyarakat namun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Oleh karena itu masyarakat Kota Tebing Tinggi diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dalam menunjang perekonomian serta tidak selalu bergantung pada bantuan sosial yang diberikan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyaluran bantuan sosial di Kota Tebing Tinggi dinilai sudah cukup baik meskipun ada berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan sudah terdapat sarana dan prasarana serta berbagai strategi dalam perencanaan, pendataan serta penyaluran dari pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi yang telah terus membuat berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk menindaklanjuti permasalahan ini.
2. Permasalahan penyaluran bantuan sosial di Kota Tebing Tinggi muncul akibat beberapa faktor seperti informasi dan data pribadi dari penerima bantuan sosial tidak lengkap. Adanya data penerima bantuan sosial yang belum atau tidak diperbarui juga menyebabkan kesulitan dan terhambatnya penyaluran bantuan sosial bagi KPM. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri yang menumbuhkan pola pikir bahwa dengan adanya bantuan sosial dapat mencukupi kehidupan sehari-hari tanpa harus bekerja dan melakukan usaha yang lebih. Selanjutnya adanya hambatan internal yakni bahan makanan yang menjadi bahan bantuan sosial program sembako tidak dapat bertahan lama sehingga harus mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah untuk memilih bahan makanan yang berkualitas baik sehingga akan bertahan sampai proses penyaluran bantuan sosial dilaksanakan.
3. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam penanganan masalah penyaluran bantuan sosial di Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan perbaikan sistem dengan observasi atau peninjauan langsung ke lapangan dengan mengawasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial.
 2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengetahui status penerimaan bantuan sosial di DTKS melalui email yang telah disediakan.
 3. Melakukan koordinasi dengan pilar-pilar sosial agar dapat mendorong pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sehingga dapat tersalurkan dengan merata serta efektif dan efisien.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang terbatas.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial di Kota Tebing Tinggi untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ardito Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 9

Ariska Suriyanti, Skripsi : “*Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin Di Kota Makassar*” (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021) hal.10

Prof.DR. Soerjono Soekanto, *SOSIOLOGI SUATU PENGANTAR* (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012), Hlm. 213

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Dhani Elison, Kota Tebing Tinggi dan Penanganan Penyebaran Covid-19 (<https://sumut.antaranews.com/berita/326426/kota-tebing-tinggi-dan-penanganan-penyebaran-covid-19>, di akses pada tanggal 05 September 2021 pukul 19:19 WITA) <https://tebingtinggikota.go.id/page/tentang-tebing-tinggi> di akses pada tanggal 05 September 2021 pukul 20:45 WITA

<https://www.tebingtinggikota.go.id/berita/berita-daerah/rapat-koordinasi-terbatas-penanggulangan-kemiskinan-pemko-tebing-tinggi> di akses pada tanggal 05 September 2021 pukul 21:00 WITA)

Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.04 No. 048, Hal. 2

“Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, Promosi Kesehatan Berbasis Daring di Desa Bukian” (<http://bisnisbali.com/upaya-pencegahan-penyebaran-covid-19-promosi-kesehatan-berbasis-daring-di-desa-bukian/> di akses pada tanggal 09 September 2021 pukul 14:42 WITA)

